

AUDITED



LAPORAN KEUANGAN 2017

AUDITED

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telepon +6221-3850455 +6221-3853922

Faksimili +6221-3856809 +6221-3856826

Website : www.ppatk.go.id

Kata Pengantar

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya.

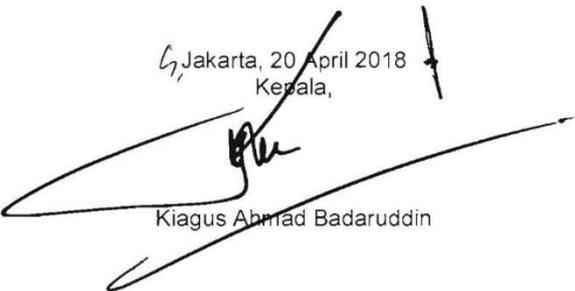
Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, PPATK adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan PPATK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan PPATK untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 ini disusun dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 Berbasis Akrual (*Audited*) yang lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami senantiasa berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat. Kami berharap bahwa Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada PPATK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Public Governance*).

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 20 April 2018
Kepala,


Kiagus Ahmad Badaruddin

Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Pernyataan Telah Direviu	viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Laporan Realisasi Anggaran	4
Neraca	5
Laporan Operasional	6
Laporan Perubahan Ekuitas	7
Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Basis Akuntansi	11
A.5. Dasar Pengukuran	12
A.6. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	22
B.2.1. Belanja Pegawai	23
B.2.2. Belanja Barang	24
B.2.3. Belanja Modal.....	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	29
C.3. Aset Lainnya	35
C.4. Kewajiban	37
C.5. Ekuitas	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Lain-Lain	50

Daftar Tabel dan Gambar

Daftar Tabel

Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	1
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017.....	1
Tabel 3	: Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016	2
Tabel 4	: Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	2
Tabel 5	: Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	3
Tabel 6	: Penggolongan Kualitas Piutang	15
Tabel 7	: Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	17
Tabel 8	: Perubahan DIPA PPATK Tahun 2017	19
Tabel 9	: Perubahan DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2017.....	19
Tabel 10	: Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017	20
Tabel 11	: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	21
Tabel 12	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017	22
Tabel 13	: Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	22
Tabel 14	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016	23
Tabel 15	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 dan 2016	24
Tabel 16	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016	26
Tabel 17	: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2017 dan 2016	27
Tabel 18	: Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi Software Per 31 Desember 2017 dan 2016	28
Tabel 19	: Rincian Persediaan 31 Desember 2017 dan 2016	29
Tabel 20	: Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2017 dan 2016	29
Tabel 21	: Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017	31
Tabel 22	: Penambahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017	31
Tabel 23	: Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017	32
Tabel 24	: Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2017	33
Tabel 25	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017	34
Tabel 26	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
Tabel 27	: Rincian Aset Lainnya 2017 dan 2016	35
Tabel 28	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017	36
Tabel 29	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2017	37
Tabel 30	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2017 dan 2016	37
Tabel 31	: Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	40
Tabel 32	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016	41
Tabel 33	: Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	42

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tabel 34	: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	42
Tabel 35	: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	45
Tabel 36	: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.....	46
Tabel 37	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	46
Tabel 38	: Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	47
Tabel 39	: Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017.....	48
Tabel 40	: Rincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017..	49
Tabel 41	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2017	52
Tabel 42	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017	52
Tabel 43	: Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017	53
Tabel 44	: Rincian Setoran Pajak	54
Tabel 45	: Rincian Kegiatan Hibah Melalui PPAK AUSTRAC <i>Partnership Program</i> Periode Kegiatan Januari-Desember 2017	56

Daftar Gambar

Gambar 1	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017	22
Gambar 2	: Struktur Organisasi Pusdiklat PPATK	50

Daftar Lampiran



Daftar Lampiran

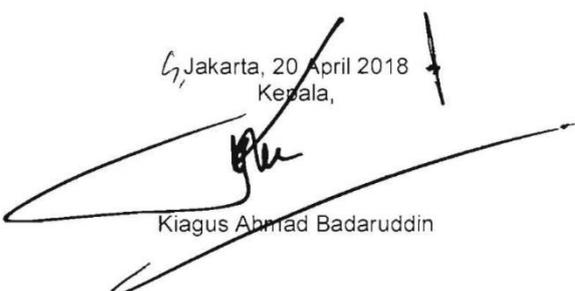
1. Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga Per 31 Desember 2017.....	A
2. Neraca Tingkat Kementerian /Lembaga Per 31 Desember 2017 dan 2016	B
3. Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016	C
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016	D
5. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017	E
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017	F
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana/ Program/ Kegiatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017	G
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017	H
9. Daftar Rekening Pemerintah	I
10. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dan Setara Kas	J
11. Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	K
12. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final	L
13. Catatan Ringkas Barang Milik Negara	M
14. Rencana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2017	N
15. Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi <i>Software</i> pada PPATK per 31 Desember 2017 dan 2016.....	O
16. Rincian Barang Persediaan Lainnya dalam Kondisi Rusak/Usang.....	P
17. Daftar BMN Yang Dihentikan Penggunaannya sampai dengan 31 Desember 2017.....	Q

Laporan Realisasi Anggaran

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017		%	31 DESEMBER 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.109.572.447	-	309.036.702
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.109.572.447	-	309.036.702
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1.1	48.460.014.000	47.239.044.122	97,48	50.772.436.525
Belanja Barang	B.2.1.2	54.196.702.000	50.953.812.612	94,02	34.977.431.590
Belanja Modal	B.2.1.3	14.512.589.000	12.908.369.630	88,95	109.866.736.450
JUMLAH BELANJA		117.169.305.000	111.101.226.364	94,82	195.616.604.565

Jakarta, 20 April 2018
 Kepala,


 Kiagus Ahmad Badaruddin

Pernyataan Tanggung Jawab



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN K E P A L A

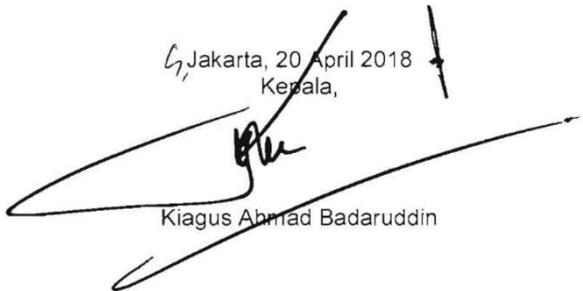
Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2018
Kepala,


Kiagus Ahmad Badaruddin

Pernyataan Telah Direviu

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

INSPEKTORAT

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk tahun anggaran 2017 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 20 Februari 2018

Inspektur



Yudi Affiandi Wirasugena

195907121987021001

Ringkasan Laporan Keuangan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 ini telah disusun dan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.109.572.447. Realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp111.101.226.364 atau mencapai 94,82% dari alokasi anggaran sebesar Rp117.169.305.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017			31 Desember 2016
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
Pendapatan	-	1.109.572.447	-	309.036.702
Belanja	117.169.305.000	111.101.226.364	94,82	195.616.604.565
Pembiayaan	-	-	-	-

Pagu dan realisasi anggaran belanja PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 menurut jenis belanja dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Neto)	% Realisasi
Pegawai	48.460.014.000	47.239.044.122	97,48
Barang	54.196.702.000	50.953.812.612	94,02
Modal	14.512.589.000	12.908.369.630	88,95
Jumlah	117.169.305.000	111.101.226.364	94,82

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2017 dicatat dan dijelaskan sebesar Rp257.920.537.546 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.773.407.837, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp245.329.763.630 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp9.817.366.079.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp1.003.469.320 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas PPATK dijelaskan sebesar Rp256.917.068.226.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3
Ringkasan Neraca
per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			Nilai	%
ASET				
Aset Lancar	2.773.407.837	1.847.625.894	925.781.943	50,11
Aset Tetap	245.329.763.630	252.899.558.954	(7.569.795.324)	(2,99)
Aset Lainnya	9.817.366.079	9.290.155.774	527.210.305	5,67
JUMLAH ASET	257.920.537.546	264.037.340.622	(6.116.803.076)	(2,32)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	1.003.469.320	218.934.543	784.534.777	358,34
JUMLAH KEWAJIBAN	1.003.469.320	218.934.543	784.534.777	358,34
EKUITAS				
Ekuitas	256.917.068.226	263.818.406.079	(6.901.337.853)	(2,62)
JUMLAH EKUITAS	256.917.068.226	263.818.406.079	(6.901.337.853)	(2,62)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	257.920.537.546	264.037.340.622	(6.116.803.076)	(2,32)

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp16.027.316, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp119.905.456.729, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp119.889.429.413) Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.125.765.169 sehingga Defisit-LO terjadi sebesar (Rp118.763.664.244).

Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4
Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			Nilai	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL	16.027.316	193.635.648	(177.608.332)	(91,72)
BEBAN OPERASIONAL	119.905.456.729	125.149.156.920	(5.243.700.191)	(4,19)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(119.889.429.413)	(124.955.521.272)	5.066.091.859	(4,05)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.125.765.169	82.926.542	1.042.838.627	1.257,55
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(118.763.664.244)	(124.872.594.730)	6.108.930.486	(4,89)
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(118.763.664.244)	(124.872.594.730)	6.108.930.486	(4,89)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp263.818.406.079 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp118.763.664.244), kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp870.960.409) dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp112.733.286.800 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp256.917.068.226.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			Nilai	%
EKUITAS AWAL	263.818.406.079	179.824.094.294	83.994.311.785	46,71
SURPLUS/DEFISIT LO	(118.763.664.244)	(124.872.594.730)	6.108.930.486	(4,89)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	(870.960.409)	5.722.520.116	(6.593.480.525)	(115,22)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	112.733.286.800	203.144.386.399	(90.411.099.599)	(44,51)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6.901.337.853)	83.994.311.785	(90.895.649.638)	(108,22)
EKUITAS AKHIR	256.917.068.226	263.818.406.079	(6.901.337.853)	(2,62)

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, antara lain penambahan Satker Pusdiklat APU dan PPT, serta pengungkapan kegiatan yang dibiayai dari hibah.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh PPAK untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

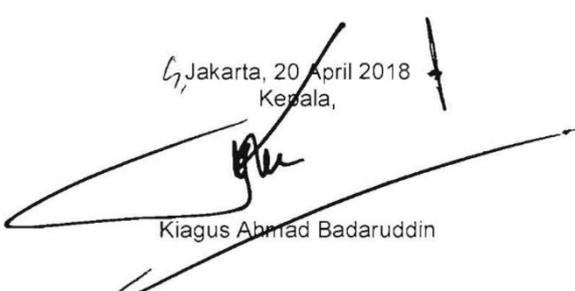
Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Neraca
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.3	1.792.897.141	789.495.046
Persediaan	C.1.4	980.510.696	1.058.130.848
Jumlah Aset Lancar		2.773.407.837	1.847.625.894
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	80.978.000.000	80.978.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	110.597.292.348	101.998.721.053
Gedung dan Bangunan	C.2.3	146.085.491.154	146.577.045.335
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	628.286.198	542.646.198
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	286.237.147	266.478.727
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(93.245.543.217)	(77.463.332.359)
Jumlah Aset Tetap		245.329.763.630	252.899.558.954
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	23.693.936.634	19.879.717.649
Aset Lain-lain	C.3.2	3.575.551.002	6.214.533.722
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(17.452.121.557)	(16.804.095.597)
Jumlah Aset Lainnya		9.817.366.079	9.290.155.774
JUMLAH ASET		257.920.537.546	264.037.340.622
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	990.452.993	196.730.212
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	13.016.327	22.204.331
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.003.469.320	218.934.543
JUMLAH KEWAJIBAN		1.003.469.320	218.934.543
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	256.917.068.226	263.818.406.079
JUMLAH EKUITAS		256.917.068.226	263.818.406.079
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		257.920.537.546	264.037.340.622

Jakarta, 20 April 2018
Kepala,

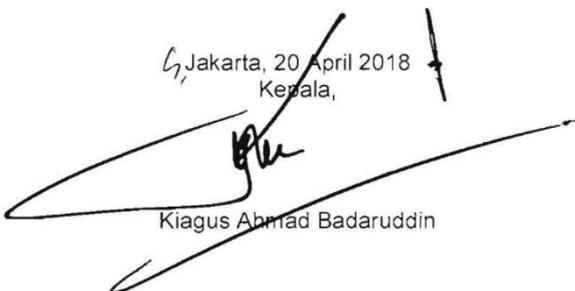

Kiagus Ahmad Badaruddin

Laporan Operasional

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	16.027.316	193.635.648
JUMLAH PENDAPATAN		16.027.316	193.635.648
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	48.051.450.842	50.684.389.411
Beban Persediaan	D.3	2.490.536.128	2.653.163.969
Beban Barang dan Jasa	D.4	28.869.737.012	23.120.679.468
Beban Pemeliharaan	D.5	4.298.868.083	4.214.517.571
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17.107.870.424	12.662.831.821
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	19.086.994.240	31.813.574.680
JUMLAH BEBAN		119.905.456.729	125.149.156.920
SURPLUS (DEFSIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(119.889.429.413)	(124.955.521.272)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFSIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	175.974.999	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		175.974.999	-
SURPLUS/(DEFSIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	963.188.283	116.555.980
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	13.398.113	33.629.438
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		949.790.170	82.926.542
SURPLUS /DEFSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.125.765.169	82.926.542
SURPLUS/DEFSIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(118.763.664.244)	(124.872.594.730)
SURPLUS/DEFSIT LO		(118.763.664.244)	(124.872.594.730)

Jakarta, 20 April 2018
Kepala,

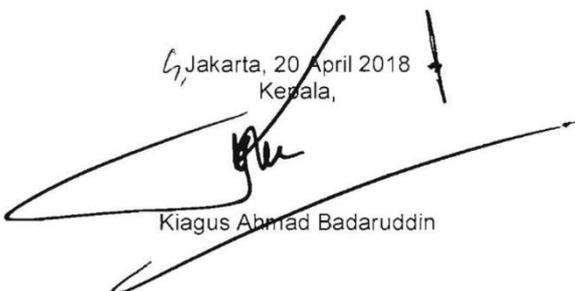

Kiagus Ahmad Badaruddin

Laporan perubahan Ekuitas

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
EKUITAS AWAL	E.1	263.818.406.079	179.824.094.294
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(118.763.664.244)	(124.872.594.730)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	(870.960.409)	5.722.520.116
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(870.960.409)	5.722.520.116
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	112.733.286.800	203.144.386.399
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(6.901.337.853)	83.994.311.785
EKUITAS AKHIR	E.5	256.917.068.226	263.818.406.079

Jakarta, 20 April 2018
 Kepala,


 Kiagus Ahmad Badaruddin

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK dituangkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut:

1.

• Visi PPATK

Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2

• Misi PPATK

- a. Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.
- b. Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia.
- c. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK.

3

• Tujuan

- a. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia.
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

4

• Arah Kebijakan dan Strategi PPATK

PPATK berupaya untuk mendukung terciptanya stabilitas sektor keuangan di Indonesia dengan menjadi *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, sehingga arah kebijakan dan strategi yang ditempuh PPATK pada periode 2015 s.d. 2019, sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan PPATK tahun 2015 s.d. 2019
 - 1) Perluasan dan peningkatan peran Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan.
 - 2) Perluasan dan peningkatan efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.
 - 3) Peningkatan kualitas Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), Informasi, dan Hasil Riset Tipologi TPPU.
 - 4) Peningkatan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut HA, HP dan Informasi kepada penyidik TPPU dan instansi terkait lainnya.
 - 5) Mendorong perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang lebih efektif.
 - 6) Peningkatan kemampuan Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan dan kemampuan penyidik TPPU dalam penanganan TPPU.
 - 7) Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

- b. Strategi yang akan dilaksanakan PPATK tahun 2015 s.d. 2019
 - 1) Meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor secara lebih efektif dan menyeluruh.
 - 2) Meningkatkan keandalan sistem pelaporan untuk mendukung Pihak Pelapor dalam pemenuhan kewajiban pelaporan.
 - 3) Meningkatkan pembinaan terhadap Pihak Pelapor yang lebih efektif dan berkesinambungan.
 - 4) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengaksesan data yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.
 - 5) Meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dengan instansi terkait.
 - 6) Meningkatkan kerja sama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain dalam rangka pertukaran informasi.
 - 7) Meningkatkan kapasitas sistem aplikasi dalam mendukung proses analisis.
 - 8) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.
 - 9) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset tipologi TPPU.
 - 10) Pelaksanaan *National Risk Assessment* (NRA).
 - 11) Mendorong penyidik TPPU untuk mengoptimalkan penggunaan sistem *Secure Online Communication* (SOC) dalam proses pertukaran informasi.
 - 12) Melaksanakan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong penyidik TPPU untuk menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada PPATK terkait penanganan tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi.

- 13) Meningkatkan upaya penyusunan produk hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.
- 14) Implementasi dan pengawasan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme secara konsisten dan terukur.
- 15) Pelaksanaan pelatihan bagi Pihak Pelapor dan penyidik TPPU secara lebih efektif dan menyeluruh.
- 16) Meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia PPATK.
- 17) Meningkatkan keandalan sistem TI PPATK.
- 18) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja PPATK.
- 19) Meningkatkan peran pengawasan internal yang efektif.
- 20) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi PPATK.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan Lembaga Pemerintah, yang hanya memiliki satu Bagian Anggaran (BA) yaitu BA 078, dan satu Satuan Kerja (Satker) yang merupakan Satker Pusat yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada PPATK.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

PPATK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar pengukuran yang diterapkan PPATK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang digunakan oleh PPATK. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPATK, yaitu:
 - i. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional periode waktu sewa.
 - ii. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

iii. Pendapatan Anggaran Lain-lain, diakui pada saat ditetapkan surat keputusan timbulnya hak.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PPATK sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

(a) Aset Lancar

- Aset Lancar diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Aset Lancar terdiri dari kas atau setara kas, piutang dan persediaan.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dijelaskan di neraca dengan menggunakan nilai nominal rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dijelaskan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Setara Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang dijelaskan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, Kementerian Keuangan menetapkan bahwa seluruh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian semua jenis persediaan. Selisih harga pembelian barang yang terjadi akan dilakukan koreksi nilai persediaan.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

(b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

(c) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

(c) Aset Tetap (lanjutan)

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

(d) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 247/PMK.06/2014.

Penyusutan Aset Tetap

(d) Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

(e) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Piutang Jangka Panjang

(e) Piutang Jangka Panjang (lanjutan)

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

(f) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dijelaskan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Tak Berwujud pada PPATK berupa *software* dan memiliki masa manfaat terbatas hingga 4 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(6) Kewajiban (lanjutan)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA-078.01.1.453374/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu awal PPATK Tahun 2017 sebesar Rp117.169.305.000 dan sampai dengan 31 Desember 2017 telah mengalami lima kali revisi, namun pagu DIPA PPATK terakhir tetap Rp117.169.305.000. Perubahan DIPA PPATK Tahun 2017 dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8
Perubahan DIPA PPATK Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan			
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja			
1	Belanja Pegawai	48.460.014.000	48.460.014.000
2	Belanja Barang	54.857.934.000	54.196.702.000
3	Belanja Modal	13.851.357.000	14.512.589.000
	Jumlah Belanja	117.169.305.000	117.169.305.000

Apabila dilihat dari program PPATK, maka perubahannya dijelaskan pada Tabel 9.

Tabel 9
Perubahan DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	79.819.305.000	79.819.305.000
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	37.350.000.000	37.350.000.000
	Jumlah Belanja	117.169.305.000	117.169.305.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.109.572.447 dan Rp309.036.702. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah PPATK adalah merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dijelaskan pada Tabel 10.

Tabel 10
Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1.109.572.447	-
	Jumlah	-	1.109.572.447	-

PNBP PPATK Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.109.572.447 terdiri dari:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp175.974.999, antara lain bersumber dari pendapatan atas hasil lelang peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, yaitu 4 (empat) unit *chiller* merk Dunham Bush dan 1 (satu) unit *auto switch/data switch*.
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp35.907, merupakan Jasa Giro yang diterima di Rekening Bank Mandiri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
3. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp6.803.405 karena:
 - a. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Alat Tulis Kantor dan Barang Kebersihan sebesar Rp19.443.
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Langganan Backup Internet Link pada PPATK Tahun Anggaran 2017 Periode Mei 2017 sebesar Rp500.000.
 - c. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Langganan Koneksi DC VPN untuk PJK pada PPATK Tahun Anggaran 2017 Periode Mei 2017 sebesar Rp385.000.
 - d. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Jasa Konsultan Perseorangan Pengelolaan Database sebagai Database Administrator sebesar Rp37.520.
 - e. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Jasa Konsultan Perseorangan Pengelolaan Database sebagai Programmer Spesialist sebesar Rp51.920.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

- f. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Perpanjangan Lisensi Software VMWARE dan Open DNS sebesar Rp3.399.356.
 - g. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Perpanjangan Lisensi sebesar Rp793.100.
 - h. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Langganan Backup Internet Link pada PPATK Tahun Anggaran 2017 Periode November 2017 sebesar Rp500.000.
 - i. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan pencetakan buku sebesar Rp1.117.066.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp38.023.025, terdiri dari:
- a. Pengembalian belanja barang TAYL atas pekerjaan pemeliharaan gedung yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp17.689.025.
 - b. Pengembalian belanja barang TAYL atas perjalanan dinas pada tahun 2016 sebesar Rp20.334.000.
5. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp888.735.111, terdiri dari:
- a. Pengembalian belanja modal TAYL atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung Pusdiklat PPATK tahun 2016 sebesar Rp594.770.854.
 - b. Pengembalian belanja modal TAYL atas koreksi terhadap pekerjaan harga timpang pembangunan gedung Pusdiklat PPATK sebesar Rp293.964.257.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 terdapat kenaikan sebesar 259,04% dibandingkan Realisasi Pendapatan Tahun 2016. Hal ini disebabkan karena terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pengembalian Belanja Barang TAYL dan Pengembalian Belanja Modal TAYL.

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 11.

Tabel 11
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2017	Tahun 2016	Rp	%
1	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.109.572.447	309.036.702	800.535.745	259,04
	Jumlah	1.109.572.447	309.036.702	800.535.745	259,04

B.2. Belanja

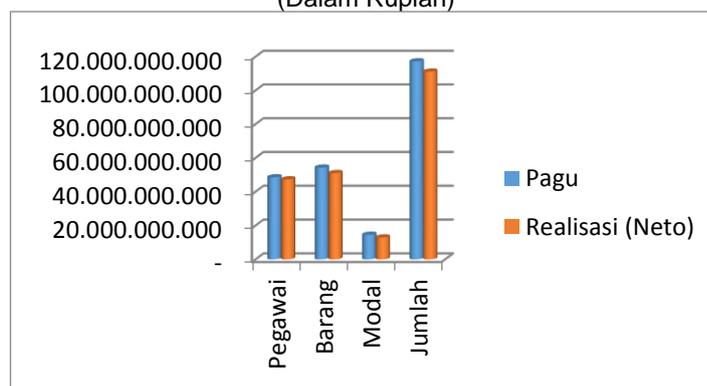
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 menurut jenis belanja dijelaskan pada Tabel 12.

Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Neto)	%
Pegawai	48.460.014.000	47.239.044.122	97,48
Barang	54.196.702.000	50.953.812.612	94,02
Modal	14.512.589.000	12.908.369.630	88,95
Jumlah	117.169.305.000	111.101.226.364	94,82

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)



Dibandingkan dengan 31 Desember 2016, Realisasi Belanja 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 43,20% yang disebabkan penurunan belanja pegawai dan belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 13.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto)
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran 31 Desember 2017	Realisasi Anggaran 31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pegawai	47.239.044.122	50.772.436.525	(3.533.392.403)	(6,96)
Barang	50.953.812.612	34.977.431.590	15.976.381.022	45,68
Modal	12.908.369.630	109.866.736.450	(96.958.366.820)	(88,25)
Jumlah	111.101.226.364	195.616.604.565	(84.515.378.201)	(43,20)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (Neto) masing-masing sebesar Rp47.239.044.122 dan Rp50.772.436.525. Terdapat penurunan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017- sebesar 6,96% dibanding Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2016. Penurunan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan:

- Terdapat Belanja Honor Uang Tetap yang pada tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp4.996.846.447 untuk pembayaran honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), namun pada tahun 2017 belanja tersebut dipindahkan ke akun Belanja Keperluan Perkantoran.
- Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara juga menurun karena terdapat gaji pokok pimpinan PPATK yang tidak dapat dicairkan pada tahun 2017 karena SK penetapannya baru diterbitkan di akhir Desember 2017.
- Terdapat penurunan Belanja Tunjangan PPh PNS karena terdapat penyesuaian perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Terdapat beberapa jabatan struktural di PPATK yang belum terisi sehingga anggaran belanja pegawai tidak terserap pada tahun 2017.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp10.766.992, terdiri dari:

- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp3.565.160.
- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp2.060.
- Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp453.648.
- Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS sebesar Rp8.224.
- Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS sebesar Rp1.850.000.
- Pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp596.650.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp1.860.000.
- Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp2.431.250.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai (Neto) Tahun 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8.091.038.491	7.959.991.190	131.047.301	1,65
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	121.646	112.015	9.631	8,60
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	453.682.630	428.948.840	24.733.790	5,77
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	116.348.580	101.826.066	14.522.514	14,26
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	738.420.000	748.620.000	(10.200.000)	(1,36)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.200.000	-	4.200.000	-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	23.468.398	127.060.948	(103.592.550)	(81,53)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	405.986.520	390.633.480	15.353.040	3,93
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.401.859.000	1.383.324.000	18.535.000	1,34

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	428.335.000	432.430.000	(4.095.000)	(0,95)
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	583.250.000	1.007.500.000	(424.250.000)	(42,11)
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	96.337.500	84.526.250	11.811.250	13,97
512111	Belanja Uang Honor Tetap	-	4.996.846.477	(4.996.846.477)	(100,00)
512211	Belanja Uang Lembur	91.027.000	68.801.000	22.226.000	32,30
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	34.815.736.349	33.057.813.389	1.757.922.960	5,32
	Jumlah Belanja Bruto	47.249.811.114	50.788.433.655	(3.538.622.541)	(6,97)
	Pengembalian Belanja Pegawai	10.766.992	15.997.130	(5.230.138)	(32,69)
	Total Belanja Pegawai	47.239.044.122	50.772.436.525	(3.533.392.403)	(6,96)

Realisasi Belanja
Barang (Neto)
Rp50.953.812.612

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp50.953.812.612 dan Rp34.977.431.590. Terjadi kenaikan Realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 45,68%.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Barang				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7.633.799.351	544.038.798	7.089.760.553	1.303,17
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	140.015.220	142.419.100	(2.403.880)	(1,69)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	235.508.330	122.092.915	113.415.415	92,89
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	24.300.000	(24.300.000)	-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.289.387.769	639.261.695	650.126.074	101,70
521211	Belanja Bahan	3.049.912.524	2.233.217.240	816.695.284	36,57
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	364.900.000	167.720.000	197.180.000	117,56
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.547.047.926	2.452.878.600	2.094.169.326	85,38
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.575.935.040	2.473.970.173	101.964.867	4,12
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Meterai dan Leges	8.700.000	6.600.000	2.100.000	31,82
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	190.911.125	178.799.439	12.111.686	6,77
522111	Belanja Langganan Listrik	2.898.975.798	2.399.637.814	499.337.984	20,81
522112	Belanja Langganan Telepon	90.588.945	112.301.419	(21.712.474)	(19,33)
522113	Belanja Langganan Air	40.846.640	46.309.580	(5.462.940)	(11,80)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	802.343.715	870.605.130	(68.261.415)	(7,84)
522131	Belanja Jasa Konsultan	3.906.555.000	3.798.256.011	108.298.989	2,85
522141	Belanja Sewa	983.802.055	1.038.016.306	(54.214.251)	(5,22)
522151	Belanja Jasa Profesi	930.830.000	1.087.700.000	(156.870.000)	(14,42)
522191	Belanja Jasa Lainnya	256.277.000	-	256.277.000	-
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	712.717.780	898.250.645	(185.532.865)	(20,65)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.237.400	79.159.200	(71.921.800)	(90,86)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.133.444.890	1.115.630.828	17.814.062	1,60
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.943.300	78.512.500	21.430.800	27,30
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.959.862.380	1.852.156.376	107.706.004	5,82

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	8.253.706.897	5.995.754.186	2.257.952.711	37,66
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	401.220.000	502.250.000	(101.030.000)	(20,12)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.206.384.000	1.341.637.500	864.746.500	64,45
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.080.445.877	4.124.552.079	(44.106.202)	(1,07)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2.442.983.038	925.260.281	1.517.722.757	164,03
	Jumlah Belanja Barang Bruto	51.244.282.000	35.251.287.815	15.992.994.185	45,37
	Pengembalian Belanja	290.469.388	273.856.225	16.613.163	6,07
	Total Belanja Barang	50.953.812.612	34.977.431.590	15.976.381.022	45,68

Kenaikan Realisasi Belanja Barang antara lain terjadi pada:

- a. Belanja Keperluan Perkantoran meningkat karena terdapat pembayaran honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang pada tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Honor Uang Tetap.
- b. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos meningkat karena terdapat banyak surat dinas terkait undangan dan koordinasi kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor.
- c. Belanja Barang Operasional Lainnya meningkat karena terdapat kegiatan Indeks Persepsi Publik Indonesia Terhadap TPPU dan TPPT.
- d. Belanja Bahan meningkat karena terdapat peningkatan konsumsi kegiatan rapat dan pencetakan bahan rapat dan laporan kegiatan.
- e. Belanja Honor Output Kegiatan meningkat karena terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan rapat koordinasi Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kegiatan persiapan *Mutual Evaluation Review FATF*, seleksi wawancara jabatan pimpinan, dan kegiatan *kick off meeting* pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017.
- f. Belanja Barang Non Operasional Lainnya meningkat karena terdapat belanja perpanjangan lisensi *Software*, pembayaran jasa penterjemah pada kegiatan *Mutual Evaluation Review FATF*, pengadaan *medical check up* dan tes kesehatan jiwa bagi peserta seleksi JPT PPATK, dan biaya peningkatan kompetensi pegawai.
- g. Belanja Langganan Listrik meningkat karena terdapat kenaikan Tarif Dasar Listrik dan penambahan satker Pusdiklat APU dan PPT.
- h. Belanja Perjalanan Biasa meningkat karena terdapat kegiatan Survei Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017, peningkatan kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, serta kegiatan pemeriksaan dan audit kepatuhan kepada Pihak Pelapor.
- i. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota meningkat karena terdapat peningkatan rapat dalam kantor dalam rangka koordinasi internal dan eksternal.
- j. Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri meningkat karena menghadiri undangan FATF dan APG.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Barang senilai Rp290.469.388, terdiri dari:

- Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp13.600.000.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp197.356.034.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp5.580.000.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp57.632.833.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri sebesar Rp16.300.521.

Realisasi Belanja Modal
(Neto)
Rp12.908.369.630

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp12.908.369.630 dan Rp109.866.736.450. Terjadi penurunan Realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 88,25%. Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Lainnya disebabkan oleh telah selesainya pembangunan Gedung Pusdiklat PPATK di Jl. Raya Tapos, Depok, Jawa Barat pada tahun 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 16.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.598.571.295	20.688.462.444	(12.089.891.149)	(58,44)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	397.180.930	83.450.673.044	(83.053.492.114)	(99,52)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		33.000.120	(33.000.120)	(100,00)
534131	Belanja Modal Jaringan	85.640.000	-	85.640.000	-
536111	Belanja Modal Lainnya	3.826.977.405	5.695.465.842	(1.868.488.437)	(32,81)
	Jumlah Belanja Bruto	12.908.369.630	109.867.601.450	(96.959.231.820)	(88,25)
	Pengembalian Belanja Modal	-	865.000	(865.000)	-
	Total Belanja Modal	12.908.369.630	109.866.736.450	(96.958.366.820)	(88,25)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.773.407.837 dan Rp1.847.625.894.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 17.

Aset Lancar
Rp2.773.407.837

C.1. Aset Lancar (lanjutan)

Tabel 17
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	1.792.897.141	789.495.046	1.003.402.095	127,09
4	Persediaan	980.510.696	1.058.130.848	(77.620.152)	(7,34)
	Jumlah	2.773.407.837	1.847.625.894	925.781.943	50,11

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 karena kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP dan LS ke Bendahara Pengeluaran (sisa uang tersebut) seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan dan telah disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP/LS BP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang belum disetorkan ke Kas negara.

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016.

Belanja Dibayar Dimuka
(*prepaid*)
Rp1.792.897.141

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.792.897.141 dan Rp789.495.046. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2017 berupa biaya perpanjangan lisensi *software* yang sudah dibayar secara penuh di tahun 2017, namun jangka waktu lisensinya melewati 31 Desember 2017.

Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software* pada PPAK per 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 18.

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*lanjutan*)

Tabel 18
Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi Software
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

No	Nama Lisensi	Jumlah
Perpanjangan Lisensi per 31 Desember 2016		
1	Verisign SSL Certificates	64.761.925
2	Mdaemon dan Security Plus	15.988.576
3	Juniper	55.912.637
4	Oracle dan Symantec	148.274.107
5	Software Open DNS dan VMWare	115.007.566
6	Support SAN Dell Compellent	179.964.421
7	Oracle dan McAfee	209.585.814
8	Symantec Endpoint Protection	-
Jumlah Perpanjangan Lisensi 2016		789.495.046
Perpanjangan Lisensi per 31 Desember 2017		
1	Lisensi Oracle	17.549.231
2	Verisign SSL Certificates (10 Domain PPATK)	122.936.603
3	Lisensi Network Forensic	679.800.000
4	Lisensi Firewall	102.531.892
5	Lisensi SAN DELL COMPELNT	191.820.471
6	Lisensi Software Open DNS dan VMWare	81.366.465
7	Web Application Filter	147.904.109
8	Juniper & McAfee Virus Scan Enterprise	72.090.685
9	GFI Languard & Mdaemon	48.493.425
10	Oracle Database Enterprise Edition	315.279.260
11	Symantec Netbackup Enterprise	13.125.000
Jumlah Perpanjangan Lisensi 2017		1.792.897.141

Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software* pada PPATK per 31 Desember 2017 dan 2016 secara lengkap disajikan pada **Lampiran O**.

Persediaan
Rp980.510.696

C.1.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp980.510.696 dan Rp1.058.130.848.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 19.

C.1.4. Persediaan (lanjutan)

Tabel 19
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Konsumsi	762.191.803	783.838.222	(21.646.419)	(2,76)
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	48.365.710	63.850.350	(15.484.640)	(24,25)
3	Bahan Baku	7.525.760	23.550.672	(16.024.912)	(68,04)
4	Suku Cadang	70.617.945	105.915.894	(35.297.949)	(33,33)
5	Persediaan Lainnya	91.809.478	80.975.710	10.833.768	13,38
	Jumlah	980.510.696	1.058.130.848	(77.620.152)	(7,34)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik. Namun, terdapat barang Persediaan Lainnya senilai Rp3.145.895 dalam kondisi rusak/usang yang dijelaskan secara lengkap pada **Lampiran P**.

Aset Tetap
Rp245.329.763.630

C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp245.329.763.630 dan Rp252.899.558.954 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 karena terdapat penambahan Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya yang seluruhnya berasal dari belanja modal. Rincian Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	80.978.000.000	80.978.000.000	-	-
2	Peralatan dan Mesin	110.597.292.348	101.998.721.053	8.598.571.295	8,43
3	Gedung dan Bangunan	146.085.491.154	146.577.045.335	(491.554.181)	(0,34)
4	Jalan irigasi dan Jaringan	628.286.198	542.646.198	85.640.000	15,78
5	Aset Tetap Lainnya	286.237.147	266.478.727	19.758.420	7,41
	Jumlah	338.575.306.847	330.362.891.313	8.212.415.534	2,49
	Akumulasi Penyusutan	(93.245.543.217)	(77.463.332.359)	(15.782.210.858)	20,37
	Nilai Buku Aset Tetap	245.329.763.630	252.899.558.954	(7.569.795.324)	(2,99)

Tanah
Rp80.978.000.000

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2017 sama dengan per 31 Desember 2016 sebesar Rp80.978.000.000.

Aset PPATK berupa tanah, terdiri dari:

1. Tanah seluas 4.500 m² berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp66.600.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2007.

C.2.1 Tanah (lanjutan)

2. Tanah seluas 5.648 m2 berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp1.281.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2010.
3. Tanah seluas 9.510 m2 berlokasi di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat senilai Rp13.097.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun.

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Tanah yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPATK per 31 Desember 2017, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian **F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap**.

Peralatan dan Mesin
Rp110.597.292.348

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp300.000/unit.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp110.597.292.348 dan Rp101.998.721.053.

Mutasi peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 21 di halaman selanjutnya.

C.2.2 Peralatan dan Mesin (lanjutan)

Tabel 21
Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2016	101.998.721.053
<i>Mutasi tambah tahun 2017:</i>	
• Pembelian yang berasal dari Belanja Modal	8.598.571.295
• Revaluasi Gedung dan Bangunan	-
Total Mutasi Tambah	8.598.571.295
<i>Mutasi kurang tahun 2017:</i>	
• Penghentian aset dari penggunaan	-
• Aset dalam proses pemindahtanganan	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	8.598.571.295
Saldo per 31 Desember 2017	110.597.292.348
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(75.996.128.595)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	34.601.163.753

Transaksi mutasi penambahan peralatan dan mesin berasal dari dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sudah terealisasi pada tahun 2017 sebesar Rp8.598.571.295.

Rincian penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal dan reklasifikasi dijelaskan pada Tabel 22.

Tabel 22
Penambahan Peralatan dan Mesin
Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah Tambah
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	801.255.000
2	Alat Kantor	85.286.248
3	Alat Rumah Tangga	1.123.565.252
4	Alat Studio	14.997.410
5	Alat Kedokteran	8.747.200
6	Komputer	372.840.600
7	Peralatan Komputer	6.093.429.585
8	Peralatan Proses/Produksi	98.450.000
	Jumlah	8.598.571.295

Gedung dan Bangunan
Rp146.085.491.154

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp146.085.491.154 dan Rp146.577.045.335.

Nilai Gedung dan Bangunan PPATK per 31 Desember 2017, terdiri dari:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung PPATK di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat dengan luas bangunan 16.630 m² senilai Rp61.279.315.524.

C.2.3 Gedung dan Bangunan (lanjutan)

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung DRC PPATK (Ciloto) di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan luas bangunan 2,200 m² senilai Rp17.029.021.133.
3. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Pusdiklat PPATK (Cimanggis) di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dengan luas bangunan 13,183 m² senilai Rp67.587.410.897, ditambah Pagar Permanen dengan luas 166 m² senilai Rp189.743.600,00.

Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.926.979.381. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dijelaskan pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan
Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2016	146.577.045.335
<i>Mutasi tambah tahun 2017:</i>	
• Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	397.180.930
• Revaluasi Gedung dan Bangunan	-
Total Mutasi Tambah	397.180.930
<i>Mutasi kurang tahun 2017:</i>	
• Koreksi Belanja Gedung dan Bangunan	(888.735.111)
Total Mutasi Kurang	(888.735.111)
Total Mutasi Tambah (Kurang)	(491.554.181)
Saldo per 31 Desember 2017	146.085.491.154
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(16.926.979.381)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	129.158.511.773

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp397.180.930 seluruhnya berasal dari Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, terdiri dari:

1. Pengadaan *Curtain Wall* dan *Grill Louver* pada Gedung Pusdiklat PPATK di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat sebesar Rp351.322.930.
2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan atas pengadaan WC Pos Keamanan pada Gedung Diklat PPATK Pusdiklat PPATK di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat sebesar Rp45.858.000.

Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp888.735.111 merupakan Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari nilai setoran atas kekurangan volume dan harga timpang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusdiklat PPATK Tahun 2016. Namun nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang tercatat sebesar Rp1.169.947.133 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp281.212.022.

C.2.3. Gedung dan Bangunan (lanjutan)

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPATK per 31 Desember 2017, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian **F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap**.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu sebesar Rp628.286.198 dan Rp542.646.198. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp299.882.741 dengan rincian mutasi dijelaskan pada Tabel 24.

Tabel 24
Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2016	542.646.198
<i>Mutasi tambah tahun 2017:</i>	
· Realisasi Belanja Modal Jaringan	85.640.000
Total Mutasi Tambah	85.640.000
<i>Mutasi kurang tahun 2017:</i>	
· Revaluasi Jalan, Jembatan dan Bangunan Air	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	85.640.000
Saldo per 31 Desember 2017	628.286.198
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(299.882.741)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	328.403.457

Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp85.640.000 seluruhnya berasal dari Belanja Modal Jaringan.

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPATK per 31 Desember 2017, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan (lanjutan)

Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPAK diungkapkan pada bagian **F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap**.

Aset Tetap Lainnya
Rp286.237.147

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp286.237.147 dan Rp266.478.727 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya antara lain buku-buku perpustakaan dan lukisan.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 (bruto) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 (bruto).

Rincian mutasi Aset Tetap lainnya dijelaskan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya
Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2016	266.478.727
<i>Mutasi tambah tahun 2017:</i>	
· Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya	19.758.420
Total Mutasi Tambah	19.758.420
<i>Mutasi kurang tahun 2017:</i>	
· Revaluasi Aset Lainnya	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	19.758.420
Saldo per 31 Desember 2017	286.237.147
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(22.552.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	263.684.647

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.758.420 seluruhnya berasal dari Belanja Modal yang sudah terealisasi berupa Bahan Perpustakaan Tercetak.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp93.245.543.217

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp93.245.543.217 dan Rp77.463.332.359. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang dijelaskan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dijelaskan pada Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2017	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2017
1	Tanah	80.978.000.000	-	80.978.000.000
2	Peralatan dan Mesin	110.597.292.348	(75.996.128.595)	34.601.163.753
3	Gedung dan Bangunan	146.085.491.154	(16.926.979.381)	129.158.511.773
4	Jalan irigasi dan Jaringan	628.286.198	(299.882.741)	328.403.457
5	Aset Tetap Lainnya	286.237.147	(22.552.500)	263.684.647
Jumlah		338.575.306.847	(93.245.543.217)	245.329.763.630

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPAK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPAK per 31 Desember 2017, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPAK diungkapkan pada bagian **F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap**.

Aset Lainnya
Rp9.817.366.079

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp9.817.366.079 dan Rp9.290.155.774 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa *software* ataupun aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya untuk operasional pemerintah. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan dijelaskan pada Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	23.693.936.634	19.879.717.649	3.814.218.985	19,19
2	Aset Lain-Lain	3.575.551.002	6.214.533.722	(2.638.982.720)	(42,46)
Jumlah		27.269.487.636	26.094.251.371	1.175.236.265	4,50
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(17.452.121.557)	(16.804.095.597)	(648.025.960)	3,86
Aset Lainnya		9.817.366.079	9.290.155.774	527.210.305	5,67

Aset Tak Berwujud
Rp23.693.936.634

C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa *software* maupun anti virus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp23.693.936.634 dan Rp19.879.717.649. Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat 1 (satu) unit *software* yang bukan merupakan ATB, namun merupakan biaya langganan internet serta 4 (empat) unit ATB senilai Rp214.167.124 yang belum dapat ditelusuri dan/atau diketahui keberadaannya namun masih tercatat di Neraca. Selain itu terdapat 8 (delapan) unit ATB senilai Rp1.284.494.580 yang sudah tidak dimanfaatkan dan akan diproses penetapan statusnya.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dijelaskan pada Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud
Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2016	19.879.717.649
Mutasi tambah tahun 2017:	
Realisasi Belanja Modal Lainnya	3.807.218.985
Reklasifikasi dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.000.000
Total Mutasi Tambah	3.814.218.985
Mutasi kurang tahun 2017:	
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	3.814.218.985
Saldo per 31 Desember 2017	23.693.936.634
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(13.876.570.555)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	9.817.366.079

Penambahan Aset Tak Berwujud terdiri dari:

1. ATB yang berasal dari Belanja Modal Lainnya, antara lain untuk pengadaan *software Oracle Database Enterprise*, Pengadaan Jasa Konsultan Penyempurnaan Aplikasi E-RKA, Pengadaan Paket *Software Microsoft Office*, dan pengadaan *Suse Linux Enterprise Server (SLES) 12*, serta pembelian *software PHP Runner*.
2. ATB yang berasal dari belanja modal penambahan nilai aset tetap lainnya dan/atau aset lainnya, yaitu pengadaan jasa konsultan penyempurnaan Aplikasi IFTI.

Aset Lain-lain
Rp3.575.551.002

C.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp3.575.551.002 dan Rp6.214.533.722. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan dalam proses penghapusan.

C.3.2 Aset Lain-lain (lanjutan)

Aset Lain-lain yang terdapat di PPATK terdiri dari:

1. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dengan nilai per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp1.847.088.579 dan Rp4.486.071.299.
2. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2017 sama dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.728.462.423.

Daftar BMN Yang Dihentikan Penggunaannya sampai dengan 31 Desember 2017 dijelaskan secara lengkap pada **Lampiran Q**.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp17.452.121.557

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp17.452.121.557 dan Rp16.804.095.597.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dijelaskan pada Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

No	Aset Lain-Lain	Nilai per 31 Desember 2017	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku per 31 Desember 2017
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	23.693.936.634	(13.876.570.555)	9.817.366.079
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.847.088.579	(1.847.088.579)	-
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.728.462.423	(1.728.462.423)	-
Jumlah		27.269.487.636	(17.452.121.557)	9.817.366.079

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp1.003.469.320

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.003.469.320 dan Rp218.934.543.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek dijelaskan pada Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Utang kepada Pihak Ketiga	990.452.993	196.730.212	793.722.781	403,46
2	Pendapatan Diterima Dimuka	13.016.327	22.204.331	(9.188.004)	(41,38)
Jumlah		1.003.469.320	218.934.543	784.534.777	358,34

*Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp990.452.993*

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga adalah belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp990.452.993 dan Rp196.730.212.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 terdiri dari:

- a. Pembayaran belanja pegawai yang masih harus dibayar Rp813.063.360.
- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Rp177.389.633.

*Pendapatan Diterima di
Muka Rp13.016.327*

C.4.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp13.016.327 dan Rp22.204.331.

Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp13.016.327 merupakan jasa sewa yang masih harus diberikan PPATK kepada BRI atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPATK dengan BRI Cab. Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2016 s.d. 31 Mei 2019 (3 Tahun) sebesar Rp27.564.000 dengan nomor referensi NTPN. 3F69A4CBSBTRIDCI tanggal 17 Juni 2016.

EKUITAS

*Ekuitas
Rp256.917.068.226*

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp256.917.068.226 dan Rp263.818.406.079. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp16.027.316*

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.027.316 dan Rp193.635.648.

Total PNBPN PPATK Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp16.027.316 berasal dari:

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (lanjutan)

1. Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan yang digunakan untuk ATM BRI di Lingkungan PPATK berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor B/52/PL.04.01/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 antara PPATK dengan PT Bank BRI Cabang Veteran untuk masa sewa 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 sebesar Rp9.188.004
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Rp35.907.
3. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan periode Januari sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp6.803.405, terdiri dari:
 - a. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Alat Tulis Kantor dan Barang Kebersihan sebesar Rp19.443.
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Langganan Backup Internet Link pada PPATK Tahun Anggaran 2017 Periode Mei 2017 sebesar Rp500.000.
 - c. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Langganan Koneksi DC VPN untuk PJK pada PPATK Tahun Anggaran 2017 Periode Mei 2017 sebesar Rp385.000.
 - d. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Jasa Konsultan Perseorangan Pengelolaan Database sebagai Database Administrator sebesar Rp37.520.
 - e. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Jasa Konsultan Perseorangan Pengelolaan Database sebagai Programmer Spesialist sebesar Rp51.920.
 - f. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Perpanjangan Lisensi Software VMWARE dan Open DNS sebesar Rp3.399.356.
 - g. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Perpanjangan Lisensi sebesar Rp793.100.
 - h. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan Langganan Backup Internet Link pada PPATK Tahun Anggaran 2017 Periode November 2017 sebesar Rp500.000.
 - i. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan pencetakan buku sebesar Rp1.117.066.

Perbandingan Rincian Pendapatan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 31.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (lanjutan)

Tabel 31
Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan Jasa				
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	9.188.004	8.898.836	289.168	3,25
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	35.907	-	35.907	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6.803.405	184.250.702	(177.447.297)	(96,31)
Jumlah Pendapatan Jasa	16.027.316	193.149.538	(177.122.222)	(91,70)
Pendapatan lain-lain				
Pendapatan Anggaran Lain-lain		486.110	(486.110)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	486.110	(486.110)	(100,00)
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	16.027.316	193.635.648	(177.608.332)	(91,72)

Beban Pegawai
Rp48.051.450.842

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp48.051.450.842 dan Rp50.684.389.411. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terdapat penurunan Realisasi Beban Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar 5,19% dibanding Realisasi Beban Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2016. Penurunan realisasi Beban Pegawai antara lain disebabkan:

- Terdapat pembayaran honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dibebankan pada akun Beban Honor Uang Tetap yang pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 dibebankan ke akun Beban Keperluan Perkantoran.
- Terdapat penyesuaian perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berpengaruh terhadap Beban Tunjangan PPh PNS.
- Terdapat beberapa jabatan struktural di PPAK yang belum terisi sehingga Beban Tunj. Struktural PNS menurun.

Namun, terdapat juga beberapa pos beban yang mengalami kenaikan yang signifikan, antara lain Beban Gaji Pokok Pejabat Negara dan Beban Tunj. PPh Pejabat Negara karena terdapat kenaikan gaji pokok pimpinan PPAK pada tahun 2017. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-hak Lain bagi Kepala dan Wakil Kepala PPAK dinyatakan bahwa besaran penghasilan dan fasilitas Pimpinan merupakan penghasilan neto yang berlaku mulai tanggal 1 Februari 2017, sehingga diakui sebagai Beban Gaji Pokok Pejabat Negara dan Beban Tunj. PPh Pejabat Negara atas pembayaran penghasilan dan fasilitas Kepala PPAK dari Februari sampai dengan Desember 2017.

D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 32.

Tabel 32
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	8.089.558.331	7.957.693.640	131.864.691	1,66
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	119.346	112.025	7.321	6,54
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	453.355.222	428.948.840	24.406.382	5,69
511122	Beban Tunj. Anak PNS	116.377.856	101.826.066	14.551.790	14,29
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	740.945.000	747.360.000	(6.415.000)	(0,86)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4.200.000	-	4.200.000	-
511125	Beban Tunj. PPh PNS	23.560.393	126.537.948	(102.977.555)	(81,38)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	405.986.520	390.633.480	15.353.040	3,93
511129	Beban Uang Makan PNS	1.401.262.350	1.383.324.000	17.938.350	1,30
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	426.445.000	432.460.000	(6.015.000)	(1,39)
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1.201.250.000	1.007.500.000	193.750.000	19,23
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	281.737.500	84.526.250	197.211.250	233,31
512111	Beban Uang Honor Tetap	-	4.990.785.977	(4.990.785.977)	(100,00)
512211	Beban Uang Lembur	91.027.000	68.801.000	22.226.000	32,30
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	34.815.626.324	32.963.880.185	1.851.746.139	5,62
Total Beban Pegawai		48.051.450.842	50.684.389.411	(2.632.938.569)	(5,19)

Beban Persediaan
Rp2.490.536.128

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.490.536.128 dan Rp2.653.163.969. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, terdiri dari:

- Beban Persediaan Konsumsi, antara lain barang cetakan, alat tulis kantor, dan perlengkapan pemeliharaan.
- Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges, berupa beban atas penggunaan materai Rp3.000 dan materai Rp6.000.
- Beban Persediaan Bahan Baku, yaitu beban atas penggunaan bahan bakar solar untuk pemeliharaan peralatan dan mesin (penggunaan *gense*).
- Beban Persediaan Lainnya, merupakan beban atas penggunaan obat-obatan di klinik dokter umum dan dokter gigi.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dan dijelaskan pada Tabel 33.

D.3 Beban Persediaan (lanjutan)

Tabel 33
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	2.326.431.500	2.432.606.496	(106.174.996)	(4,36)
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	8.700.000	6.600.000	2.100.000	31,82
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	24.733.712	44.417.888	(19.684.176)	(44,32)
593149	Beban Persediaan Lainnya	130.670.916	169.539.585	(38.868.669)	(22,93)
Total Beban Persediaan		2.490.536.128	2.653.163.969	(162.627.841)	(6,13)

Beban Barang dan Jasa
Rp28.869.737.012

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp28.869.737.012 dan Rp23.120.679.468. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 34.

Tabel 34
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
Beban Barang					
521111	Beban Keperluan Perkantoran	7.633.799.241	650.522.475	6.983.276.766	1.073,49
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	140.015.220	142.419.100	(2.403.880)	(1,69)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	235.508.330	122.092.915	113.415.415	92,89
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	24.300.000	(24.300.000)	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.289.387.769	639.261.695	650.126.074	101,70
521211	Beban Bahan	3.049.912.524	2.230.087.740	819.824.784	36,76
521213	Beban Honor Output Kegiatan	351.300.000	155.757.500	195.542.500	125,54
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.536.645.831	2.214.287.507	1.322.358.324	59,72
Beban Jasa					
522111	Beban Langganan Listrik	2.886.846.149	2.349.587.708	537.258.441	22,87
522112	Beban Langganan Telepon	90.432.575	109.003.132	(18.570.557)	(17,04)
522113	Beban Langganan Air	34.448.720	50.356.980	(15.908.260)	(31,59)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	802.343.715	870.605.130	(68.261.415)	(7,84)
522131	Beban Jasa Konsultan	3.906.555.000	3.798.256.011	108.298.989	2,85
522141	Beban Sewa	983.802.055	1.038.016.306	(54.214.251)	(5,22)
522151	Beban Jasa Profesi	930.830.000	1.062.780.000	(131.950.000)	(12,42)
522191	Beban Jasa Lainnya	2.997.909.883	7.658.989.269	(4.661.079.386)	(60,86)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	4.356.000	(4.356.000)	-
Total Beban Barang dan Jasa		28.869.737.012	23.120.679.468	5.749.057.544	24,87

D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

Kenaikan Beban Barang dan Jasa, antara lain terjadi pada

- a. Beban Keperluan Perkantoran meningkat karena terdapat pembayaran honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang pada tahun sebelumnya dibebankan pada Beban Uang Honor Tetap.
- b. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos meningkat karena terdapat banyak surat dinas terkait undangan dan koordinasi kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor.
- c. Beban Barang Operasional Lainnya meningkat karena terdapat kegiatan Indeks Persepsi Publik Indonesia Terhadap TPPU dan TPPT.
- d. Beban Bahan meningkat karena terdapat peningkatan konsumsi kegiatan rapat dan pencetakan bahan rapat dan laporan kegiatan.
- e. Beban Honor Output Kegiatan meningkat karena terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan rapat koordinasi Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kegiatan persiapan Mutual Evaluation Review FATF, seleksi wawancara jabatan pimpinan, dan kegiatan kick off meeting pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017.
- f. Beban Barang Non Operasional Lainnya meningkat karena terdapat Beban perpanjangan lisensi Software, pembayaran jasa penterjemah pada kegiatan Mutual Evaluation Review FATF, pengadaan medical check up dan tes kesehatan jiwa bagi peserta seleksi JPT PPAK, dan biaya peningkatan kompetensi pegawai.
- g. Beban Langganan Listrik meningkat karena terdapat kenaikan Tarif Dasar Listrik dan penambahan satker Pusdiklat APU dan PPT.

Selain itu, Beban Jasa Lainnya (kode akun: 522191) yang dijelaskan pada Tabel 36, terdiri dari:

1. Pembayaran pengadaan Paket Interpreter Kegiatan *Mutual Evaluation Review* sebesar Rp176.275.000.
2. Pembayaran belanja barang atas Investasi *Seminar Capacity Building* PPAK sebesar Rp45.000.000.
3. Pembayaran pengadaan company profile pada Pusdiklat PPAK Rp35.002.000.
4. Hibah melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dengan nama *Project Development of The Indonesian Board of Audit Performance and Financial Audit Capacity*, dan Nomor Referensi/Registrasi Hibah GA 30.08.2006/71012601 tanggal Record of Understanding (ROU) 30 Agustus 2006 yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2016. Kegiatan hibah tersebut dilaksanakan melalui PPAK – AUSTRAC Partnership Program (PAPP) yang seluruhnya sudah dilaksanakan pada 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan nilai AUD276,095.96 atau sama dengan Rp2.741.632.883 (kurs tengah BI per tanggal BAST = Rp9.930).

D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

Kegiatan Hibah tersebut sudah diajukan pengesahan ke Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melalui surat Sekretaris Utama PPATK Nomor T/105/KU.06.02/VI/2017 tanggal 14 Juni 2016 perihal Permohonan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Jasa, namun permohonan tersebut dikembalikan oleh DJPPR dengan surat Nomor S-471/PR/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Pengembalian Permohonan Pengesahan Hibah dikarenakan terdapat kekurangan dana alokasi hibah yang tercatat di sistem pencatatan hibah DJPPR, sehingga perlu dilakukan pembaharuan data. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan koordinasi antara BPK RI, PPATK dan DFAT, disepakati untuk dibuat Surat Pernyataan BPK RI, PPATK dan DFAT tentang Pembaharuan Alokasi Budget Atas Hibah *Development of The Indonesian Board of Audit's Performance and Financial Audit Capacity* pada Desember 2017, sehingga pengesahan dapat dilakukan pada 31 Desember 2017. Kegiatan PAPP di tahun 2016 yang sudah disahkan pada 31 Desember 2017 terdiri dari:

- a. *Project 1* – Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, merupakan kegiatan Workshop PPATK dan pakar dari AUSTRAC untuk membantu mengembangkan perangkat tambahan IT dalam rangka melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri dengan nilai hibah sebesar Rp196.967.707.
- b. *Project 2* – Program Pertukaran Analisis PPATK dan AUSTRAC, merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka kerja sama di bidang analisis transaksi keuangan dengan melakukan program pertukaran analisis antara AUSTRAC dan PPATK dengan nilai hibah Rp194.402.589.
- c. *Project 3* – Kegiatan persiapan FATF *Mutual Evaluation* dengan nilai hibah Rp1.290.054.858.
- d. *Project 4* – *Regulatory Exchange Program (REP)*, yaitu kegiatan REP ke Sydney dan Wellington dengan nilai hibah Rp818.833.758.
- e. *Project 5* – Perpajakan (*Taxation*), yaitu dalam rangka menghadiri *Executive Level Meeting* antara Kepala PPATK dan AUSTRAC di Sydney, Australia terkait *Tax Amnesty* di Indonesia dengan nilai hibah sebesar Rp54.826.509.
- f. *Project 6* - *Actionable Financial Intelligence* kegiatan dalam rangka meningkatkan peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan dengan nilai hibah sebesar Rp186.547.462.

Beban Pemeliharaan
Rp4.298.868.083

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.298.868.083 dan Rp4.214.517.571. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Persediaan suku cadang, dan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 35.

Tabel 35
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	712.717.780	898.250.645	(185.532.865)	(20,65)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.133.444.890	1.115.630.828	17.814.062	1,60
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.959.862.380	1.851.581.376	108.281.004	5,85
593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	377.526.850	195.067.786	182.459.064	93,54
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	115.316.183	153.986.936	(38.670.753)	(25,11)
Total Beban Pemeliharaan		4.298.868.083	4.214.517.571	84.350.512	2,00

Beban Perjalanan Dinas
Rp17.107.870.424

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp17.107.870.424 dan Rp12.662.831.821. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas, dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Perjalanan Biasa meningkat karena terdapat kegiatan Survei Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017, peningkatan kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, serta kegiatan pemeriksaan dan audit kepatuhan kepada Pihak Pelapor.
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota meningkat karena terdapat peningkatan rapat dalam kantor dalam rangka koordinasi internal dan eksternal.
- Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri meningkat karena menghadiri undangan FATF, APG dan Egmont Group.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 36.

D.6. Beban Perjalanan Dinas (lanjutan)

Tabel 36
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	8.056.350.863	5.815.845.260	2.240.505.603	38,52
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	401.220.000	502.850.000	(101.630.000)	(20,21)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.200.804.000	1.333.570.000	867.234.000	65,03
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.022.813.044	4.084.553.110	(61.740.066)	(1,51)
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2.426.682.517	926.013.451	1.500.669.066	162,06
Total Beban Perjalanan Dinas		17.107.870.424	12.662.831.821	4.445.038.603	35,10

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp19.086.994.240

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp19.086.994.240 dan Rp31.813.574.680.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 37.

Tabel 37
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.812.911.323	26.135.326.888	(13.322.415.565)	(50,97)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.931.382.284	2.262.179.313	669.202.971	29,58
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.264.620	54.264.620	-	-
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.427.333	-	1.427.333	-
592115	Beban Amortisasi Software	3.286.128.680	3.087.150.354	198.978.326	-
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	880.000	274.653.505	(273.773.505)	(99,68)
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		19.086.994.240	31.813.574.680	(12.726.580.440)	(40,00)

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPAATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPAATK per 31 Desember 2017, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi (lanjutan)

Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian **F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap**.

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp949.790.170

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari kegiatan Non Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp949.790.170 dan Rp82.926.542.

Perbandingan Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dijelaskan pada Tabel 38.

Tabel 38
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	38.023.025	7.222.000	30.801.025	426,49
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	888.735.111	-	888.735.111	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	36.430.147	109.333.980	(72.903.833)	(66,68)
	Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	963.188.283	116.555.980	846.632.303	726,37
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(10.252.218)	(32.577.526)	22.325.308	(68,53)
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(3.145.895)	(1.051.912)	(2.093.983)	199,06
	Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(13.398.113)	(33.629.438)	20.231.325	(60,16)
	Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non	949.790.170	82.926.542	866.863.628	1.045,34

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp
Rp263.818.406.079

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp263.818.406.079 dan Rp179.824.094.294.

Surplus(defisit) LO
(Rp118.763.664.244)

E.2. Surplus(Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah defisit sebesar (Rp118.763.664.244) dan (Rp124.872.594.730). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas
(Rp870.960.409)

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp870.960.409) dan Rp5.722.520.116.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (lanjutan)

Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas dijelaskan pada tabel 39.

Tabel 39
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
391114	Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(870.960.409)	14.789.928.035	(15.660.888.444)	(105,89)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		(9.067.407.919)	9.067.407.919	(100,00)
Total Transaksi Antar Entitas		(870.960.409)	5.722.520.116	(6.593.480.525)	(115,22)

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPATK per 31 Desember 2017, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian **F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap**

Transaksi Antar Entitas
Rp112.733.286.800

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain ditambah pengesahan hibah langsung. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp112.733.286.800 dan Rp203.144.386.399.

Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dijelaskan pada Tabel 40.

Tabel 40
Rincian Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	111.101.226.364	195.616.604.565	(84.515.378.201)	(43,20)
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.109.572.447)	(309.036.702)	(800.535.745)	259,04
391131	Pengesahan Hibah Langsung	2.741.632.883	7.836.818.536	(5.095.185.653)	(65,02)
Total Transaksi Antar Entitas		112.733.286.800	203.144.386.399	(90.411.099.599)	(44,51)

Ditagihkan ke Entitas
Lain Rp111.101.226.364

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja PPAK yang melibatkan kas negara/Bendahara umum Negara (BUN). Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp111.101.226.364 dan Rp195.616.604.565.

Diterima dari Entitas
Lain (Rp1.109.572.447)

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan PPAK yang melibatkan kas negara/Bendahara umum Negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp1.109.572.447) dan (Rp309.036.702).

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp2.741.632.883

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung berupa barang dan jasa yang sudah diterima PPAK dan disahkan oleh KPPN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.741.632.883 dan Rp7.836.818.536.

Ekuitas Akhir
Rp256.917.068.226

E.5. Ekuitas Akhir

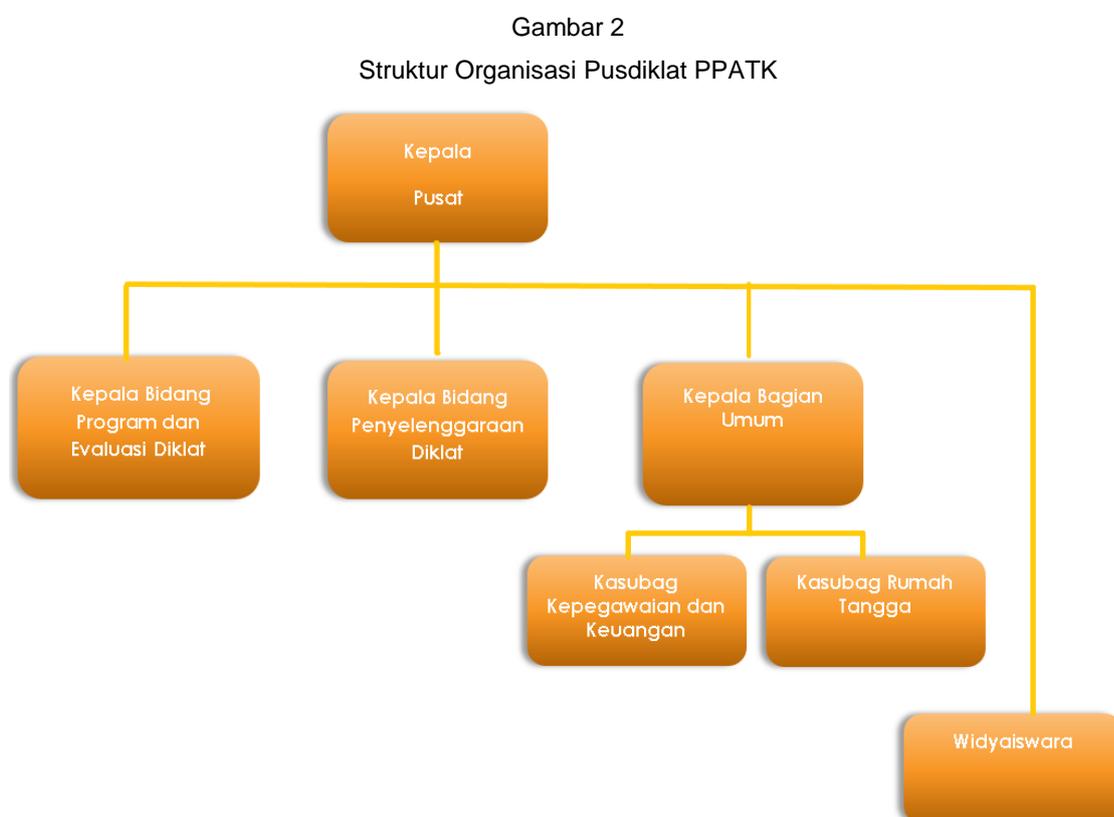
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp256.917.068.226 dan Rp263.818.406.079.

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1. PEMBENTUKAN SATKER PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PUSDIKLAT APU dan PPT)

Pusdiklat APU dan PPT diresmikan pada tanggal 30 November 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK nomor 03 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Struktur Organisasi Pusdiklat APU dan PPT disajikan pada Gambar 2.



Berdasarkan surat Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-1578/AG/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Penetapan Kode dan Nomenklatur Satker Baru di Lingkungan PPATK TA 2018, Pusdiklat APU dan PPT ditetapkan sebagai Satker mandiri dengan kode Satker 417654 dan kode lokasi 02.58.

F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang Ekuitas pada Laporan Keuangan.

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 dan LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017, telah dilakukan penilaian kembali atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPATK per 31 Desember 2017, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017 dinyatakan bahwa hasil revaluasi BMN yang telah disajikan dalam *face LKKL* Tahun 2017 perlu dilakukan koreksi melalui Satker Konsolidasi, sehingga dibentuk Satker Konsolidasi PPATK, sebagai berikut:

- a. Kode BA 078 – PPATK
- b. Kode Unit 55 - Konsolidasian PPATK
- c. Kode Satker 555078 - Konsolidasian PPATK
- d. Kode KPPN 555 – KPPN Konsolidasian
- e. Kode Jenis Kewenangan – Kantor Pusat (KP)
- f. Kode Wilayah 0199 – Kantor Pusat

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan PPATK Tahun 2017 yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF-078/13.a/R/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018 dilakukan koreksi yang dijelaskan pada Tabel 41, Tabel 42, dan Tabel 43.

Tabel 41
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Neraca
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited	Koreksi		Asersi Final
		Debet	Kredit	
Tanah	325.328.697.000		244.350.697.000	80.978.000.000
Gedung dan Bangunan	212.636.175.897		66.550.684.743	146.085.491.154
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	191.178.000	437.108.198		628.286.198
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.809.131.946)	1.002.053.446		(2.807.078.500)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(11.981.133)		14.407.802.489	(14.419.783.622)
Jumlah	534.334.937.818	1.439.161.644	325.309.184.232	210.464.915.230

Tabel 42
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited	Koreksi		Asersi Final
		Debet	Kredit	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	20.071.594.176	17.453.510	1.002.053.446	19.086.994.240
Jumlah	20.071.594.176	17.453.510	1.002.053.446	19.086.994.240

F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

Tabel 43
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited	Koreksi		Asersi Final
		Debet	Kredit	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	324.855.497.524	324.855.497.524		0
Jumlah	324.855.497.524	324.855.497.524	0	0

F.3. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 diketahui bahwa saldo kas di Buku Kas Umum nihil (Rp0,00). Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran oleh BPK pada tanggal 30 Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp70,00 antara Buku Kas Umum dengan Kas dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran, baik berupa kas tunai, kas di bank, maupun surat berharga lainnya. Bendahara Pengeluaran telah membuat Buku Kas Umum, dan Buku-Buku Pembantu (BP) seperti BP Kas, BP Uang Muka, BP UP, BP LS Bendahara, BP Pajak dan BP Lain-Lain. Bendahara (bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) juga telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dalam tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, diketahui terdapat Potongan Pajak yang terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp16.472.500, yang berasal dari Honorarium sebesar Rp11.177.500 dan Uang Saku Rapat Dalam Kantor sebesar Rp5.295.000. Selain itu, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2017 diketahui terdapat pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 total sebesar Rp20.475.250. Namun dari bukti setoran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) diketahui bahwa jumlah total SSP hanya sebesar Rp20.035.250, sehingga terdapat selisih sebesar Rp440.000 (Rp20.475.250 – Rp20.035.250) yang belum disetor ke kas negara. Total kurang setor sebesar Rp16.912.500,00 (Rp16.472.500,00 + Rp440.000,00).

Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran PPAK melakukan penghitungan ulang atas Potongan Pajak yang berasal dari Honorarium dan Uang Saku Rapat Dalam Kantor sehingga diketahui bahwa jumlah Potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp.16.912.500. Atas kekurangan setoran tersebut Bendahara Pengeluaran telah menindaklanjuti dengan menyetorkan 6 (enam) kali ke Kas Negara. Rincian setoran pajak dijelaskan pada tabel 44.

F.3. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran (lanjutan)

Tabel 44
Rincian Setoran Pajak
(Dalam Rupiah)

No	Tanggal	Setoran Pajak	NTPN
1.	09/04/2018	1.810.000	ED7FF7QTMFFRHFHKO
2.	02/04/2018	6.892.500	DE6A1810PHRN1098
3.	29/03/2018	40.000	EC7F51EE0707QTCI
4.	28/03/2018	3.835.000	A088A7U6C1OPP7K8
5.	28/03/2018	3.935.000	AC224807005S8BKB
6.	28/03/2018	400.000	38A4F807MRVKLNK8
Jumlah		16.912.500	

F.4. Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima hibah langsung barang dan jasa dari Pemerintah Australia melalui Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) - Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Hibah tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia terkait dengan Dana Kemitraan Pemerintah (Government Partnership Fund) Fase II, tanggal 2 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Richard Moore, Deputy Director General, Asia Division, Australian Agency for International Development (AusAID) dan Dr. Rizal Affandi Lukman, MA, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. SA tersebut mengalami perubahan terakhir dengan SA yang ditandatangani oleh James Gilling, Minister, Development Cooperation, Department of Foreign Affairs and Trade dan Dr. Rizal Affandi Lukman, MA, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan masa perjanjian sejak SA ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 31 Desember 2017.

Hibah dari pemerintah Australia tersebut teregister di Kementerian Keuangan dengan nama Project Development of The Indonesian Board of Audit Performance and Financial Audit Capacity, dan Nomor Referensi/Registrasi Hibah GA 30.08.2006/71012601 serta tanggal Record of Understanding (ROU) 30 Agustus 2006 dengan alokasi nilai hibah sebesar AUD4,375,039 dan dilaksanakan oleh dua instansi, yaitu BPK RI dan PPATK. Kegiatan PPATK yang dibiayai dari hibah pemerintah Australia di PPATK dilaksanakan melalui PPATK – AUSTRAC Partnership Program (PAPP).

F.4. Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah (lanjutan)

Berdasarkan hasil koordinasi antara BPK RI, PPATK dan DFAT, disepakati untuk dibuat Surat Pernyataan antara BPK RI, PPATK dan DFAT tentang Pembaharuan Alokasi Budget Atas Hibah Development of The Indonesian Board of Audit's Performance and Financial Audit Capacity pada Desember 2017 sehingga nilai alokasi hibah untuk PPATK dan BPK RI menjadi AUD8,786,242.38.

Laporan kegiatan PAPP Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sudah diterima PPATK pada tanggal 29 Januari 2018. Hibah tersebut merupakan hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar AUD809.301,99, dengan rincian sebagai berikut:

1. Work Stream 1 - Reporting and Analysis Systems Development dengan nilai hibah AUD23.314,12 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
2. Work Stream 2 - FATF Mutual Evaluation Coordination dengan nilai hibah AUD234.175,55 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
3. Work Stream 3 - Capability Development on Crime types, Emerging IT, Internal Training dengan nilai hibah AUD32.305,45 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
4. Work Stream 4 - Examinations Systems and Applications Development dengan nilai hibah AUD55.190,45 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
5. Work Stream 5 - Regulatory Exchange Program dengan nilai hibah AUD39.065,37 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
6. Work Stream 6 - Strategic Research Exchange Program dengan nilai hibah AUD70.340,31 dilaksanakan pada periode Januari-Juni 2017.
7. Work Stream 1 - Reporting and Analysis Systems Development dengan nilai hibah AUD9.177,31 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
8. Work Stream 2 - FATF Mutual Evaluation and Membership dengan nilai hibah AUD266.142,86 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
9. Work Stream 3 - Indonesia Institution Financial Intelligence dengan nilai hibah AUD46.610,45 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
10. Work Stream 4 - Analyst Secondment dengan nilai hibah AUD73,37 dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2017.
11. Work Stream 5 - Regional Engagement and Capacity Development dengan nilai hibah AUD32,906.75 periode Juli-Desember 2017.

Rincian Kegiatan Hibah Melalui PPATK AUSTRAC *Partnership Program* Periode Kegiatan Januari-Desember 2017 dijelaskan pada Tabel 45.

F.4. Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah (lanjutan)

Tabel 45
Rincian Kegiatan Hibah Melalui PPAK AUSTRAC Partnership Program
Periode Kegiatan Januari-Desember 2017

No.	Nama Hibah	Nilai Hibah (AUD)	Kurs BAST	Nilai Hibah (Rp) Dibulatkan	Jenis Hibah
Hibah Semester I - Tahun 2017 yang Diserahterimakan di Tahun 2018					
1	<i>Work Stream 1 - Reporting and Analysis Systems Development</i>	23,314.12	10.728,78	250.132.064	Jasa
2	<i>Work Stream 2 - FATF ME Coordination</i>	234,175.55	10.728,78	2.512.417.957	Jasa
3	<i>Work Stream 3 - Capability Development on Crime types, Emerging IT, Internal Training.</i>	32,305.45	10.728,78	346.598.066	Jasa
4	<i>Work Stream 4 - Examinations Systems and Applications Development</i>	55,190.45	10.728,78	592.126.196	Jasa
5	<i>Work Stream 5 - Regulatory Exchange Program</i>	39,065.37	10.728,78	419.123.760	Jasa
6	<i>Work Stream 6 - Strategic Research Exchange Program.</i>	70,340.31	10.728,78	754.665.711	Jasa
Subtotal Semester I Tahun 2017		454,391.25	10.728,78	4.875.063.754	
Hibah Semester II - Tahun 2017 yang Diserahterimakan di Tahun 2018					
7	<i>Work Stream 1 - Reporting and Analysis Systems Development</i>	9,177.31	10.728,78	98.461.340	Jasa
8	<i>Work Stream 2 - FATF ME and Membership</i>	266,142.86	10.728,78	2.855.388.194	Jasa
9	<i>Work Stream 3 - Indonesia Institution Financial Intelligence</i>	46,610.45	10.728,78	500.073.264	Jasa
10	<i>Work Stream 4 - Analyst Secondment</i>	73.37	10.728,78	787.171	Jasa
11	<i>Work Stream 5 - Regional Engagement and Capacity Development</i>	32,906.75	10.728,78	353.049.281	Jasa
Subtotal Semester II Tahun 2017		354,910.74	10.728,78	3.807.759.250	
TOTAL		809,301.99	10.728,78	8.682.823.004,00	

Kegiatan PAPP Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.682.823.004 atau ekuivalen AUD809.301,99 sudah diserahterimakan dan dilakukan pengesahan ke KPPN Jakarta VI dengan Memo Pengesahan Hibah Langsung (MPHL) bentuk Jasa Nomor 363 tanggal 16 April 2018, dan Persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung (PMPHL) Nomor 2018175453374001 tanggal 17 April 2017. Selanjutnya, hibah ini akan disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan PPAK Tahun 2018.



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat | www.ppatk.go.id